

**PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MENGURANGI
KEMISKINAN DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(STUDI KASUS PELAKU USAHA MIKRO)**

Intan Dwi Lestari

NPP. 32.0255

Asdaf Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 32.0255@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs M. B. Zubakhrum Tjenreng, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement /Background (GAP): Bengkulu City occupies a relatively high percentage of poverty, this is due to the high unemployment rate in Bengkulu City. Micro, Small and Medium Enterprises are economic sectors that have a great contribution in providing job opportunities and increasing people's income, especially among the lower middle class. **Purpose:** This study aims to find out and analyze the role of Micro, Small and Medium Enterprises, especially micro business actors, in reducing poverty in the Bengkulu City area. **Method:** This study uses a qualitative approach with a case study method, which was conducted on several micro business actors in Bengkulu City. This research uses a qualitative approach with a case study method to gain an indepth understanding of the role of micro businesses in reducing poverty in Bengkulu City. Data was collected directly from micro business actors through interview and field observation techniques as well as documentation. The results of the study show that micro businesses play an important role in boosting the local economy and have a positive impact on improving people's welfare. **Result:** The existence of micro businesses is able to create jobs that absorb labor from the surrounding environment, as well as encourage household economic independence. However, micro businesses also face various challenges, including limited access to capital, low managerial skills, difficulties in product marketing, and lack of use of digital technology. These findings underscore the importance of ongoing support from various parties, including governments, financial institutions, and private partners, to strengthen the capacity of Micro, Small and Medium Enterprises. **Conclusion:** Small business actors are the key to increasing the effectiveness of UM as one of the strategic instruments in efforts to alleviate poverty in a sustainable manner in Bengkulu City. The Micro, Small and Medium Enterprises Cooperative Office in reducing poverty in Bengkulu City, Bengkulu Province, realizes efforts to reduce poverty through good collaboration between the Cooperative Office and various parties, it is hoped that the management of MSMEs in Bengkulu City can be more effective and sustainable.

Keywords: Role, MSMEs, Micro Enterprises, Poverty

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Kota Bengkulu menduduki persentase kemiskinan yang tergolong masih tinggi, ini disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran yang ada di Kota Bengkulu. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar dalam menyediakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya pelaku usaha mikro, dalam mengurangi kemiskinan di wilayah Kota Bengkulu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dilakukan terhadap beberapa pelaku usaha mikro di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran usaha mikro dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu. Data dikumpulkan secara langsung dari pelaku usaha mikro melalui teknik wawancara dan observasi lapangan serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha mikro berperan penting dalam mendorong perekonomian lokal dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Hasil/Temuan:** Keberadaan usaha mikro mampu menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar, serta mendorong kemandirian ekonomi rumah tangga. Namun demikian, usaha mikro juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses permodalan, keterampilan manajerial yang masih rendah, kesulitan dalam pemasaran produk, serta kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra swasta, untuk memperkuat kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. **Kesimpulan:** Pelaku usaha kecil menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas UM sebagai salah satu instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Kota Bengkulu. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, mewujudkan upaya-upaya dalam mengurangi kemiskinan melalui kolaborasi yang baik antara Dinas Koperasi dan berbagai pihak, diharapkan pengelolaan UMKM di Kota Bengkulu dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, UMKM, Usaha mikro, Kemiskinan

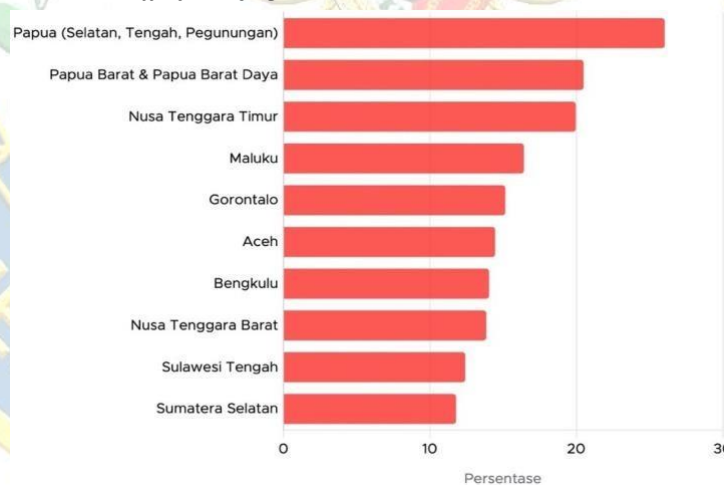
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang umum di suatu wilayah. Keadaan ini ditandai oleh rendahnya pendapatan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Rendahnya pendapatan juga berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai standar hidup yang layak, termasuk dalam aspek kesehatan dan pendidikan. Palikhah (2017) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan kemiskinan sebagai Kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, perlindungan dari ancaman kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Soegoto et al. (2022)

Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan bahwa persentase pada bulan Maret 2024, jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia mencapai 25,22 juta orang, yaitu penurunan sebanyak 0,68 juta orang dari tahun lalu di Maret 2023 serta penurunan lebih lanjut sekitar 1,14 juta orang dibandingkan dengan September 2022. Perbandingan penduduk miskin pada Maret 2024 adalah 9,03%, mengalami penurunan sebesar 0,33% jika dibandingkan dengan Maret 2023 dan turun lagi menjadi 0,54% bila dilihat dari September 2022. Angka garis kemiskinan per kapita untuk bulan Maret 2024 berjumlah Rp582.932,-. Komponennya meliputi garis kemiskinan karena kebutuhan makanan sebesar Rp433.906,- (atau 74,44%) dan garis kemiskinan bukan karena kebutuhan makanan sebesar Rp149.026,- (atau 25,56%). Penurunan angka kemiskinan per Maret 2024 berdasarkan oleh kuatnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial dari pemerintah, khususnya untuk mengatasi lonjakan inflasi pangan pada awal tahun 2024, Indonesia saat ini diklaim berada di peringkat 73 sebagai negara termiskin di dunia.

Gambar 1. 1 Data 10 Provinsi Dengan Presentase Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Periode Maret 2023

Berdasarkan Gambar 1.1, yang diambil dari data dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa provinsi Bengkulu menjadi provinsi yang termasuk ke dalam 10 (sepuluh) besar provinsi dengan presentase kemiskinan yang tinggi yaitu sebesar 14,23%. Persentase penduduk miskin di Provinsi

Bengkulu menduduki peringkat ketujuh tertinggi di Indonesia dengan angka mencapai 16,45 persen. Artinya, sekitar 164 hingga 165 dari setiap 1.000 penduduk di provinsi ini tergolong miskin. Meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu dikarenakan mayoritas penduduknya berpendidikan hanya sampai tingkat SD, ditambah lagi dengan tingginya tingkat pengangguran yang ada. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, di mana masing-masing faktor saling berhubungan dan memiliki kaitan sebab- akibat (kausalitas). Damayanti (2022). Dampak dari Kualitas sumber daya manusia yang rendah membuat kualitas kehidupan masyarakat yang juga rendah, yang pada akhirnya menurunkan tingkat produktivitas masyarakat.

Terdapat beberapa cara untuk menekan angka kemiskinan yaitu dengan cara mengembangkan UMKM. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Keduanya dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam lapisan ekonomi rendah. Hidayat (2022). UMKM sebagai ujung tombak urusan ekonomi, tentu dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Siregar & Razali (2022). Berikut adalah beberapa peran yang dimainkan oleh pengembangan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya mengurangi kemiskinan menurut Kementrian Koperasi 2008 yaitu sebagai berikut :

1. Penciptaan Lapangan Kerja
2. Peningkatan Pendapatan
3. Akses Modal
4. Pengembangan Keterampilan
5. Peningkatan Nilai Tambah
6. Pengembangan Daerah

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kemiskinan di Kota Bengkulu ini. Tingginya tingkat kemiskinan ini disebabkan oleh mayoritas penduduk yang hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SD serta tingginya angka pengangguran yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. 1
Angka Kemiskinan Kota Bengkulu 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
<i>Year</i>	<i>Number of Poor People (thousand)</i>	<i>Miskin Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)
2019	69,26	18,09
2021	66,94	17,89
2022	59,43	15,73
2023	56,10	14,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2023

Selama satu dekade terakhir, Kota Bengkulu tampaknya belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Bisa dilihat pada tabel 1.1 menunjukan data presentase kemiskinan di Kota Bengkulu Pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Bengkulu sebesar 14,71%, turun dari capaian angka kemiskinan Tahun 2022 sebesar 15,73%. Capaian pada Tahun 2022 ini turun sebesar 1,02% dari angka kemiskinan pada tahun 2022, dan persentase kemiskinan Kota Bengkulu pada tahun 2023 ini sudah lebih baik dari capaian Provinsi Bengkulu dengan tingkat kemiskinan Tahun 2022 mencapai 14,88%, namun masih berada di atas capaian rata-rata Nasional sebesar 9,36%. Besarnya angka persentase kemiskinan juga berbanding lurus terhadap jumlah angka kemiskinan di Kota Bengkulu. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan serta penerapan program-program penanggulangan kemiskinan, salah satunya yaitu Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Ilahi et al. (2023)UMKM memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, mengingat populasi Indonesia yang banyak, sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran.Nursini (2020)

UMKM adalah jenis usaha yang dapat dijalankan dengan relatif mudah oleh berbagai lapisan masyarakat, baik dari kalangan ekonomi tinggi maupun rendah, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Alfianto, D., & Lambelanova (2021)Salah satu bentuk UMKM yang umum dijalankan adalah kegiatan *livelihood activities*, yaitu usaha kecil menengah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pedagang kaki lima. Rendra et al. (2023). UMKM memiliki dampak yang signifikan di tengah masyarakat, terutama dalam pemberdayaan individu yang belum atau tidak memiliki pekerjaan. Dengan adanya UMKM, setidaknya seseorang dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan terhindar dari kemiskinan. Saat ini UMKM cukup diminati oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, salah satu strategi kunci untuk mengurangi kemiskinan di Indonesiaadalah dengan mengembangkan UMKM. Dahmiri & Khalik (2023).Pemerintah perlu terus mendorong kemajuan UMKM dengan memberikan berbagai fasilitas dan dukungan, seperti pelatihan, pembiayaan, dan akses ke pasar. Prasetyo (2008).Keberadaan UMKM di Kota Bengkulu telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencari sumber pendapatan. Peningkatan jumlah pengangguran di Kota Bengkulu serta penurunan pertumbuhan industri telah menjadikan UMKM sebagai penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan dukungan kepada UMKM di Kota Bengkulu.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran usaha mikro kecil dan menengah maupun konteks mengurangi kemiskinan.

Penelitian pertama oleh Nirwan,Aminuddin dkk, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UMKM dalam mengurangi tingkat Pengangguran dan Kemiskinan: (1) menguji dan menganalisa peran UMKM dalam mengurangi tingkat pengangguran (2) menguji dan menganalisa peran UMKM dalam mengurangi Kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear sederhana dengan menggunakan data Sekunder (Time Series) tahun 2016-2020. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dan

aktivitas UMKM berkontribusi pada penurunan angka pengangguran sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah yang diteliti. Nirwan et al. (2021)

Penelitian kedua oleh Putri S yakni Usaha mikro kecil, menengah (Red-UMKM) adalah usaha yang memiliki kontribusi penting bagi perekonomian di Indonesia. mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Hal ini juga dapat dijadikan kesempatan oleh masyarakat untuk membuka bisnis. Namun, dalam perkembangannya, UMKM masih memiliki modal yang terbatas. Sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah dan lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menganalisis literatur dan data sekunder terkait UMKM dan kemiskinan. Putri (2021)

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Iztiyar Ashar yakni Dalam upaya pembangunan ekonomi rakyat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Keberadaan UMKM di Indonesia mempunyai peran penting dalam menyediakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan perekonomian nasional. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran dana KUR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengembangan usaha kecil dilihat dari bertambahnya jumlah UMKM, tenaga kerja UMKM dan nilai output UMKM serta meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Iztiyar & Ashar (2016)

Penelitian keempat Meida Rachmawati dalam jurnal berbahasa inggrisnya menyatakan bahwa *Poverty is still a big issue that occurs in almost all over the world, including third world countries like Indonesia*. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis. Secara teoritis, UMKM sangat memungkinkan memecahkan masalah kemiskinan. UMKM memiliki probabilitas yang sangat kuat sebagai jalan keluar yang representatif untuk mengurangi kemiskinan. Sapipto & Rachmawati (2022).

Penelitian kelima Berdasarkan hasil penelitian oleh Hippy di Provinsi Gorontalo yang menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif melalui survei dengan kuesioner terstruktur, sampel dipilih secara purposive. Penelitian ini melibatkan pelaku usaha dan konsumen terkait objek penelitian yang berkaitan dengan hubungan UMKM dengan kemiskinan yang bellawanan, yakni artinya semakin berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah maka kemiskinan pun akan mengalami penurunan dengan begitu UMKM berperan dalam menurunkan kemiskinan. Hippy et al. (2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Peran Usaha Mikro Kecil dan menengah dalam mengurangi kemiskinan Studi Kasus pada Pelaku Usaha Mikro. Berbeda dengan penelitian Nirwan, Aminuddin dkk (2021) yang hanya mengetahui peran UMKM dalam mengurangi tingkat Pengangguran dan Kemiskinan. Penelitian ini menganalisis bagaimana peran Usaha Mikro dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan, mengkaji secara lebih mendalam Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu melalui Teori Peran Menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010) yang berdimensi Peran Dinas sebagai Regulator, Peran Dinas sebagai Dinamisator, Peran Dinas sebagai Fasilitator serta Peran Dinas sebagai Katalisator.

Selain itu, tidak seperti Putri S (2021) yakni Usaha mikro kecil, menengah (Red-UMKM) adalah usaha yang memiliki kontribusi penting bagi perekonomian di Indonesia. Penelitian oleh Putri S mengkaji UMKM secara umum. Hal ini menjadi pembeda signifikan karena Penelitian ini mengkaji secara spesifik peran UMKM dalam konteks pengentasan kemiskinan di Kota Bengkulu dengan fokus

pada efektivitas program-program lokal seperti memberikan bantuan modal dan alat usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Penelitian ini juga menghadirkan kontribusi baru dengan menempatkan konteks pada analisis dampak langsung program tersebut terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Bengkulu, serta bagaimana Usaha Mikro Kecil Menengah mampu bertahan dan beradaptasi di masa era digitalisasi seperti sekarang ini. Tidak seperti penelitian Iztiyar Ashar (2016) Sacipto & Rachmawati (2022) yakni menitikberatkan dalam upaya pembangunan ekonomi rakyat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dijadikan sarana kebijakan pembangunan nasional serta sebagai jalan keluar yang representatif untuk mengurangi kemiskinan.

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan studi yang menghubungkan Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan upaya pengurangan kemiskinan melalui studi kasus pelaku usaha mikro. Berbeda dengan penelitian Hippy (2022) di Provinsi Gorontalo yang menemukan bahwa UMKM berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan tanpa adanya bantuan oleh instansi atau lembaga lain, penelitian ini justru menemukan hubungan yang berlawanan di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran UMKM dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu berjalan secara teknis, namun tetap membutuhkan dukungan dari instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.

Dengan landasan tersebut, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas wacana Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada level daerah dengan menekankan pentingnya penguatan kapasitas pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah serta strategi pengembangan usaha yang responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Bengkulu. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan tidak hanya untuk konteks Kota Bengkulu, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerahdaerah lain yang memiliki karakteristik kemiskinan dan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serupa.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Mengetahui dan menganalisis peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

I. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan menggunakan metode yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun analisisnya menggunakan Teori Peran Menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010) yang berdimensi Peran Dinas sebagai Regulator, Peran Dinas sebagai Dinamisator, Peran Dinas sebagai Fasilitator serta Peran Dinas sebagai Katalisator.

Pendekatan ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Sugiono (2012) prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan maupun lisan tentang objek dan perilaku yang diamati merupakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi. Fajarina et al. (2022). Selanjutnya menurut Nugrahani (2014) mengatakan bahwa Pendekatan kualitatif lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial karena dalam penelitian kualitatif data dan penelitian lebih ditekankan. Dengan menerapkan metode kualitatif pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengurangi

kemiskinan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan mendalam guna menangkap makna dan konteks sosial yang tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif. Setiap penelitian kualitatif dalam pemerintahan dapat memiliki variasi dalam desainnya, karena disesuaikan dengan sifat alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang bersifat dinamis, di mana fenomena dapat muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alami. Fernandes (2016).

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, dapat melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi, dan lainnya. Informan penelitian, seperti yang disampaikan oleh Basrowi (2008), adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dan Masyarakat di lingkup Dinas Koperasi, yang berjumlah 16 orang. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran peran Usaha Mikro dan Menengah dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro. Peran berdasarkan teori Ryass Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010) menyatakan bahwa ada 4 Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yakni sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam mengurangi kemiskinan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Dinas

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah menetapkan dan mengimplementasikan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti perizinan dan pelatihan, serta memastikan regulasi tersebut efektif melalui pemantauan dan evaluasi berkala. Regulator bertugas menyediakan fasilitas dan memberdayakan UMKM dalam hal perizinan, permodalan, dan akses pasar, termasuk penyederhanaan proses perizinan untuk memudahkan pelaku usaha mikro kecil berkembang. Secara keseluruhan, peran dinas sebagai regulator telah berjalan sesuai harapan, dengan dukungan kebijakan dan program yang memperkuat pemberdayaan UMKM, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan terutama dalam aspek pemasaran dan teknologi.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu mendukung pelaku usaha mikro dengan berbagai bentuk bantuan yang dirancang untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi. Salah satu langkah utama adalah pendampingan legalitas usaha, di mana Dinas membantu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, izin edar BPOM, dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada 180 UMKM. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar nasional dan memperluas akses pasar. Selain itu, Dinas juga memberikan subsidi biaya pendaftaran HAKI dan

menghapus izin gangguan untuk mengurangi birokrasi yang sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha.

Tabel 4. 5 Jumlah Usaha Mikro

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Mikro yang dibina	Unit	176	113	113	149	165
Jumlah Usaha Mikro	Unit	45.702	45.702	45.702	44.627	44.705
Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	0,25	0,25	0,25	0,33	0,37

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu 2024

Dinas Koperasi Mikro Kecil dan Menengah membantu pelaku usaha Mikro mengakses sumber daya penting seperti modal, bahan baku, dan jaringan bisnis, serta mendorong penggunaan teknologi baru dan inovasi dalam produksi dan pemasaran. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama; hanya 30-50 peserta per pelatihan yang dapat dijangkau, sementara total UMKM di Bengkulu mencapai lebih dari 195 ribu usaha. Selain itu, banyak pelaku UMKM masih kesulitan dalam literasi digital; sekitar 65% dari mereka belum dapat mengadopsi sistem pembayaran digital dan pemasaran online secara efektif. Akses terhadap permodalan juga menjadi masalah karena sosialisasi program pembiayaan syariah masih belum maksimal, terutama di daerah pedesaan. Rendahnya partisipasi dalam pelatihan disebabkan oleh kurangnya informasi serta prioritas usaha harian yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM untuk mengatasi tantangan ini.

Dinas koperasi dan UMKM berperan efektif sebagai katalisator dengan responsivitas tinggi dalam menangani keluhan dan kebutuhan UMKM sehingga mempercepat proses pengembangan usaha. Berbagai program dan kebijakan yang dijalankan oleh dinas sebagai katalisator telah berjalan cukup baik dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM, namun masih perlu peningkatan dalam pemerataan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap program tersebut

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan untuk mendukung pelaku usaha UMKM, yang berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Beberapa faktor pendukung yang signifikan dalam upaya ini mencakup program pemerintah, penghapusan izin gangguan, subsidi biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), pelatihan dan pendampingan, serta kolaborasi dengan stakeholder.

2. Faktor Penghambat

Rendahnya keterampilan manajerial dan kewirausahaan di kalangan pelaku UMKM juga menjadi faktor penghambat. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan, pemasaran, atau strategi bisnis. Akibatnya, mereka kesulitan dalam mengelola usaha mereka secara efektif, bahkan dapat mengalami kerugian atau kebangkrutan. Ketidakmampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha menjadi

tantangan besar bagi banyak UMKM. Salah satu hambatan utama yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dengan jumlah UMKM yang sangat banyak, Dinas mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan yang memadai. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan dinas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Tanpa dukungan yang cukup, banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan bimbingan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka secara efektif. Hal ini mengakibatkan kurangnya inovasi dan pengembangan dalam bisnis mereka.

3.3. Upaya

1. Upaya Langsung

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara aktif menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM. Program ini mencakup pelatihan dalam bidang manajemen usaha, pemasaran digital, dan keterampilan teknis lainnya. Dinas juga memberikan subsidi biaya pendaftaran HAKI bagi pelaku UMKM. Dengan melindungi produk mereka secara hukum, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing dan mencegah plagiarisme, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka.

2. Upaya Tidak Langsung

Dinas mendorong kolaborasi antara UMKM dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas akses pasar dan sumber daya bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat berkembang lebih baik. Dinas Koperasi juga melakukan sosialisasi mengenai program-program yang ada untuk membantu pelaku UMKM memahami cara mengakses bantuan dan fasilitas yang disediakan pemerintah. Dengan meningkatkan pemahaman tentang program-program ini, diharapkan lebih banyak pelaku usaha yang dapat memanfaatkan peluang yang ada.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian mengenai peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu, dengan studi kasus pada pelaku usaha mikro, mengungkapkan beberapa poin penting. Pertama, UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Namun, pertumbuhan UMKM di Kota Bengkulu menghadapi berbagai kendala, terutama masalah keterbatasan modal dan kurangnya akses informasi serta pemahaman terhadap program pemberdayaan.

Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu sangat signifikan dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Dinas ini berfungsi sebagai fasilitator dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan, sebagai regulator dengan menetapkan kebijakan yang mendukung kemudahan perizinan dan perlindungan usaha, serta sebagai katalisator yang mendorong kolaborasi dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Program-program seperti Bengkulu Makmur yang memberikan bantuan modal dan alat usaha menjadi faktor penting dalam pengembangan UMKM di kota ini.

Temuan-temuan tersebut jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti oleh Nirwan, Aminuddin dkk., menganalisis peran UMKM pada tingkat nasional menggunakan data time series 2016-2020. Putri S juga meneliti kontribusi UMKM secara umum dalam perekonomian Indonesia, sedangkan Hippy (2022) meneliti di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini berfokus pada peran

UMKM dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu, dengan studi kasus pada pelaku usaha mikro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada pelaku usaha mikro di Kota Bengkulu, kemungkinan besar dengan metode kualitatif atau campuran, untuk melihat secara mendalam peran UMKM di tingkat lokal. Sedangkan penelitian Nirwan, Aminuddin dkk. menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi time series data sekunder, Penelitian Putri S menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan studi literatur serta penelitian Hippy (2022) di Gorontalo juga menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara perkembangan UMKM dan tingkat kemiskinan.

Nirwan, Aminuddin dkk. menemukan bahwa peningkatan jumlah dan aktivitas UMKM secara signifikan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah yang diteliti. Sedangkan penelitian ini menekankan bahwa peran UMKM dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu berjalan secara teknis, namun membutuhkan dukungan lebih lanjut dari dinas terkait untuk optimalisasi peran tersebut. Penelitian oleh Putri S menegaskan bahwa UMKM berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, tetapi masih menghadapi hambatan dalam akses pasar dan modal.

Dengan demikian, masih ada hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia di dinas terkait dan rendahnya kesadaran pelaku UMKM akan digitalisasi dan akses permodalan yang optimal. Hal ini menghambat potensi UMKM untuk berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi maksimal dalam pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu. Pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, dalam mendukung pelaku usaha mikro agar peran UMKM dalam pengurangan kemiskinan lebih efektif.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat yakni rendahnya keterampilan manajerial dan kewirausahaan di kalangan pelaku Usaha Mikro dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

III. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu Studi Kasus pada Pelaku Usaha Mikro menyediakan berbagai bentuk dukungan seperti pelatihan, pendampingan usaha, serta akses terhadap permodalan dan pasar, Serta berperan mempercepat proses pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah. Dinas ini tidak hanya menetapkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM, tetapi juga secara aktif memberikan dorongan dan bantuan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi penyediaan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM, pendampingan usaha yang bertujuan membantu pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber permodalan dan pasar. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu juga berperan dalam mempercepat proses pertumbuhan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan yang inovatif serta responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Dengan adanya peran aktif dari dinas terkait, diharapkan UMKM di Kota Bengkulu dapat tumbuh lebih cepat, mampu bersaing di pasar yang lebih luas, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bengkulu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu studi kasus saja yakni pelaku usaha mikro. Penelitian ini belum bisa melihat peran UMKM secara keseluruhan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dan cakupan studi kasus yang lebih luas berkaitan dengan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, D., & Lambelanova, R. (2021). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 6(2)(November).
- Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

- Dahmieri, D., & Khalik, I. (2023). Pengaruh Lingkungan Keluarga, Karakteristik Wirausaha dan Inovasi Produk Terhadap Keberhasilan Usaha. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1). <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.758>
- Damayanti, N. R. (2022). Kemiskinan: Pengertian, Penyebab, hingga Jenis-jenisnya. In 3 Januari 2022.
- Fajarina, M., Bahtiar, Y., & Daristin, P. E. (2022). AN ERROR ANALYSIS IN WRITING THESIS ABSTRACT OF ENGLISH DEPARTMENT. *E-LINK JOURNAL*, 9(2). <https://doi.org/10.30736/ej.v9i2.718>
- Hidayat, A. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6).
- Hippy, M. Z., Canon, S., & Rauf, A. (2022). The Role of Food Processed Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Reducing Poverty Levels in Gorontalo Province. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 2(1). <https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i1.81>
- Ilahi, Y. F., Abidin, M., Ekowati, V. M., & Lesmana, C. I. (2023). The Role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Alleviating Poverty Caused by Unemployment. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(02). <https://doi.org/10.22219/jep.v21i02.27331>
- Iztiyar, I., & Ashar, K. (2016). Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil dan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Universitas Hasanuddin*, Vol. 1(No. 1).
- Nirwan, Semmaila, B., & Aminuddin. (2021). Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Palopo. *Tata Kelola*, 8(1). <https://doi.org/10.52103/tatakelola.v8i1.525>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan*. Solo: Cakra Books.
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Palikhah, N. (2017). Konsep Kemiskinan Kultural. *ALHADHARAH*, 15(30). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1205>
- Prasetyo, E. (2008). Peran UMKM Dalam Kemiskinan. *Jurnal Akmenika Upy*, 2(2).
- Putri, S. (2021). PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>
- Rendra, P. P. R., Sulaksana, N., Haryanto, I., & Sulastri, M. (2023). PEMBERDAYAAN POTENSI UMKM BIDANG KULINER SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI DAERAH JATINANGOR, SUMEDANG. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.38500>
- Sacipto, R., & Rachmawati, M. (2022). *Implementation of the Rule of Law Democracy Through Public Preferences on the Implementation of the 2020 Regional Head Elections*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315820>
- Simangunsong, Fernandes (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Siregar, F. A., & Razali, K. (2022). UMKM PARTICIPATION IN HALAL INDUSTRY: THE LEGAL FRAMEWORK AND OPPORTUNITIES. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(1). <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i1.10393>
- Soegoto, H., Soegoto, S. W., & Meyer, D. F. (2022). THE ROLE OF DOMESTIC INVESTMENT, FOREIGN INVESTMENT, AND MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES FOR POVERTY REDUCTION IN INDONESIA. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(5). <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i5.1072>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.